

TAJUK RENCANA

Memburu Mafia Minyak

NEGERI ini sedang terguncang hebat oleh kasus megakorupsi yang terjadi di PT Pertamina (Persero). Korupsi ini melibatkan para petinggi di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Shipping dan PT Pertamina Internasional. Sedikitnya, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas skandal yang diduga merugikan negara hingga Rp 968, 5 triliun, atau hampir sepertiga APBN tahun 2025. Sejauh ini Kejaksaan Agung baru menetapkan pejabat dari PT Pertamina sebagai tersangka serta seorang putera pengusaha minyak terkenal Riza Chalid, yakni M Kerry Adrianto Riza.

Kalau mau jujur, dugaan mafia minyak di Pertamina, sebenarnya bukanlah isu baru, bahkan sudah muncul sejak tahun 1970-an. Namun seiring perjalanan waktu, modus operandi yang dilancarkan semakin canggih, mulai dari pengadaan minyak mentah, impor bahan bakar minyak (BBM), hingga penetapan harga yang tidak transparan. Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2024 yang sedang disidik Kejagung, diduga kuat selain melibatkan pihak internal Pertamina, juga pihak swasta sebagai perantara.

Negara dirugikan akibat mark up, harga minyak impor dinaikkan sebelum proses lelang, sehingga memberi keuntungan bagi pihak tertentu. Ini tentu sangat aneh, padahal tersedia minyak dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Lebih menyakitkan lagi, praktik blending Peralite menjadi Pertamina yang dilakukan sejak 2018 hingga 2024. Bayangkan, selama enam tahun masyarakat membeli Pertamina telah tertipu karena sesungguhnya yang mereka beli adalah Peralite (RON 90) yang telah diblending untuk meningkatkan kadar ok-

tannya menjadi RON 92 (Pertamax).

Mengapa kasus tersebut baru terbongkar saat ini? Rasanya tidak masuk akal bila praktik curang yang sudah berlangsung sejak 2018 hingga 2024 ini tidak ada yang tahu. Kita menduga ada semacam tindakan pembiaran, yang diduga kuat melibatkan mafia minyak. Jika demikian, maka urusannya bermuara pada siapa yang diuntungkan dalam kasus megakorupsi di Pertamina ini. Dalam ungkapan sederhana, siapa mendapatkan apa.

Meski demikian, kita tetap mengapresiasi langkah Kejagung membongkar skandal korupsi di Pertamina, terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang merugikan negara hingga Rp 968, 5 triliun. Harapannya, tentu pengungkapan tidak berhenti pada penetapan tersangka pejabat Pertamina dan pengusaha, melainkan juga dari unsur birokrasi pemerintahan. Tidaklah masuk akal skandal megakorupsi Pertamina di luar pantauan birokrasi. Wajar bila muncul pertanyaan, sejauh mana pengawasan terhadap kinerja Pertamina selama ini?

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan membersihkan negeri ini dari segala bentuk korupsi, wajib kita dukung dan menjadi momentum bagi Kejaksaan Agung maupun penegak hukum lainnya untuk secara total membeberantas korupsi, kolusi dan nepotisme di Pertamina. Inilah saatnya untuk bersih-bersih di perusahaan energi pelat merah ini. Lebih penting lagi, harus ada political will yang kuat dari pemerintah untuk memutus mata rantai mafia minyak yang selama ini menggerogoti keuangan negara. Kiranya sudah saatnya pemerintah lebih berani memburu, menangkap, dan memproses hukum para mafia minyak yang telah bikin rakyat sengsara. □-d

'Bandul' Representasi



AURA politik di Indonesia memanas dalam sebulan terakhir. Di antara banyaknya kasus yang telah mengemuka, salah satu perbincangan hangat yang urung dibicarakan oleh publik ialah instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui surat edaran kepada kepala daerah terpilih untuk menunda keterlibatannya dalam agenda retreat. Beberapa kepala daerah terpilih pun pada akhirnya menunda keberangkatannya untuk mengikuti instruksi tersebut.

Keputusan ini pun melahirkan efek domino. Wakil Presiden Indonesia mengeluarkan pantun ketika mengisi agenda retreat yang diduga menyindir instruksi ketua umum PDIP. Sindiran utama yang hendak disampaikan ialah kepala daerah terpilih harus mematuhi perintah Presiden. Di tengah kondisi kian memanas, Ahmad Basarah, juru bicara (jubilir) PDIP, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan tentang surat edaran PDIP yang tengah tersebar. Selain mempertegas bahwa surat edaran yang disebar adalah imbauan penundaan keterlibatan kepala daerah terpilih dalam retreat, pesan lain yang tersirat ialah agar kader PDIP yang menjadi kepala daerah terpilih untuk memprioritaskan program kerja nyata yang berdampak kepada publik secara langsung. Balutan perbincangan ini pun melahirkan asumsi dari publik: benarkah kepala daerah terpilih akan mengutamakan kepentingan partai politik terlebih dahulu di atas kepentingan lainnya?

Muara atas pertanyaan di atas berujung kepada satu kata kunci, yaitu representasi. Kepala daerah akan selalu berdiri di antara kedua kepentingan, yaitu partai politik dan publik. Namun ada kalanya kepala daerah mengutamakan kepentingan partai politik, dan berdampak kepada 'tersisihnya' kepentingan publik. Ada pula kalanya sebaliknya. Ketika kepentingan publik diutamakan maka kepentingan partai politik cenderung terpinggirkan.

Dasar argumen di atas dapat kita

Arga Pribadi Imawan

analogikan dengan melihat cara bekerjanya bandul Newton. Ketika kita mengangkat dan melepaskan salah satu bola di ujung, bola itu menabrak tiga bola yang berada di tengah, tetapi bola yang berada di tengah tidak bergerak. Justru, energi dari bola pertama berpindah ke bola terakhir, sehingga bola terakhirlah yang terlontar ke atas. Bola yang terlontar, kembali menghantam tiga bola yang diam di tengah yang kemudian memberikan efek lontaran kem-



KR-JOKO SANTOSO

bali ke satu bola yang kita tarik di awal. Efek ini terus berulang setiap kali bola di ujung dilepaskan.

Ilustrasi kerja bandul Newton ini sama halnya dengan posisi kepala daerah. Kepala daerah diibaratkan sebagai 'tiga bola' yang tetap diam, di tengah benturan antara bola dari kedua sisi. Sedang masing-masing ujung kedua bola yang aktif diibaratkan sebagai kepentingan partai politik dan publik. Dengan kata lain, kepala daerah berdiri dalam dua kaki antara kepentingan partai politik dan publik. Ketika kepala daerah melakukan arahan atas kepentingan partai politik, maka dia akan 'cenderung' menjauh dari kepentingan publik. Begitupun sebaliknya. Ketika mengutamakan kepentingan publik, maka akan menjauh dari kepentingan partai politik. Oleh karenanya, menjadi kepala daerah itu tidak 'saklek' berdiri

untuk mementingkan kepentingan partai politik ataupun publik.

Analogi di atas didasarkan kepada premis kajian Aldrich (1995) dalam "Why Parties: The Origin and Transformation of Political Parties in America" yang mengatakan bagaimana pun politisi membutuhkan partai politik untuk berkontestasi dalam pemilu maupun mewujudkan ambisinya melalui partai politik. Partai politik dibentuk untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh politisi secara individual, seperti masalah pengambilan keputusan legislatif. Sementara itu, politisi menggunakan partai politik untuk mencapai ambisi politik yang lebih luas, meskipun terkadang tujuan politisi berbeda dengan tujuan partisan (Aldrich, 1995).

Oleh karenanya, hubungan simbiosis mutualisme yang terjalin mengisyaratkan bahwa partai politik dan politisi tidak dapat terpisahkan. Kondisi kian kompleks tatkala mekanisme pemilu mengharuskan partai politik dan politisi saling bekerjasama untuk menarik simpati publik dalam menduduki jabatan kekuasaan. Kondisi ini yang membentuk tentang kodrat politisi (re: kepala daerah) untuk berdiri lintas batas antara partai politik dan publik, sebagai bandul representasi. Dengan kata lain, bukanlah suatu hal yang aneh ketika terdapat politisi atau kepala daerah yang mematuhi instruksi partai politik, karena hal ini pun merupakan wujud disiplin partai politik. □-d

**Arga Pribadi Imawan, Mahasiswa Doktoral dalam Ilmu Politik di Northern Illinois University (NIU), Amerika Serikat; Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Pangkas Anggaran



KABINET Prabowo-Gibran membuat berbagai gebrakan di awal masa pemerintahannya. Ada pemindahan penjualan gas melon dari pengecer ke agen, yang akhirnya dibatalkan. Ada pemberlakuan PPN 12% yang akhirnya dibatalkan. Ada penundaan pembayaran tunjangan kinerja para Dosen ASN yang sudah 5 tahun belum dibayarkan, serta tunjangan sertifikasi dosen PTS yang juga 'masih diblokir' rekeningnya oleh Kemenkeu' (menurut penjelasan Dikti). Kemudian ada aplikasi perpajakan CoreTax yang menuai kritik tajam, karena biaya pembuatannya mencapai triliun rupiah, tetapi beberapa bagian di dalamnya masih belum berfungsi dengan baik.

Namun yang akan disoroti di artikel ini adalah kebijakan Makan siang Bergizi Gratis (MBG), yang akhirnya membuat banyak orang bereaksi. Bagaimana tidak, program yang ditujukan untuk para siswa sekolah ini, harus memangkas anggaran banyak Kementerian, Lembaga Negara, dan bahkan Pemda (K/L/D). Sepertinya negara sedang darurat pangan, sehingga anggaran secara masif harus digeser untuk memberi makan kepada generasi penerus bangsa. Karena baru mulai dilaksanakan, Pemerintah meminta masyarakat memaklumi kalau masih terjadi kekurangan di sana-sini. Namun hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah belum siap menjalankan program ini. Bahkan ada tokoh masyarakat yang menyulitkan agar masyarakat ikut bergotong-royong mendukung program MBG ini dengan ikut saweran, menyumbang sebisanya.

Benarkah Kurang Gizi?

Pertanyaan mendasar adalah apakah benar masyarakat kita, terutama para siswa sekolah, kekurangan gizi secara nasional? Sepertinya tidak, karena selama ini tidak ada pembahasan bahwa siswa dan pelajar mengalami kekurangan gizi. Di era Presiden Jokowi, memang

Wing Wahyu Winarno

terjadi masalah stunting, yaitu banyaknya balita kekurangan gizi. Namun ternyata tidak selalu disebabkan oleh kemiskinan orangtua bayinya, tetapi sebagian karena ketidakpedulian orangtua terhadap bayinya. Karena sang ibu juga bekerja, maka mereka menyerahkan balitanya kepada asisten rumah tangga atau anggota keluarga yang lain. Ketika si balita harus disuapi, kadang-kadang memerlukan proses yang lama dan harus penuh kesabaran. Akhirnya diselesaikan secara paksa, makanan belum habis, dibuang, atau dimakan sendiri saja. Akhirnya, Presiden Jokowi membuat program strategis nasional, untuk mengatasi stunting. Hal ini juga dimasukkan ke dalam program pendampingan dan evaluasi *Smart City* di hampir seluruh kota di Indonesia.

Tetapi kebijakan MBG ini seperti program untuk mencari popularitas di awal masa jabatan Prabowo-Gibran. Pemerintah belum memiliki peta yang jelas tentang gizi ini, berapa persen jumlah siswa yang mengalami kekurangan gizi, di daerah mana saja, sejak kapan, apa penyebabnya, dan sebagainya. Lalu jawabannya sederhana: semua pelajar dikasih MBG. Sebagian orangtua tentu senang, tidak perlu memikirkan lagi makan siang putra-putrinya. Tetapi bagi sebagian orangtua yang lain, akan mengatakan iRp10.000 per porsi dapat apa?!

Demi kesuksesan program ini, maka anggaran berbagai K/L/D dipotong besar-besaran. Sekarang muncul berita, lembaga ini, kementerian ini, instansi ini, hanya bisa membayar gaji pegawainya sampai Mei 2025, sampai Oktober 2025, dsb. Hal ini tentu menjadi masalah, karena pembayaran gaji tentu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi dengan alasan apapun. Namun anehnya, anggaran kementerian dan institusi

yang berkaitan dengan hukum, tetap utuh. Apakah ini berarti kalau anggaran dikurangi, penegakan hukum akan bermasalah? Tapi, bukankah penegakan hukum di Indonesia ini masih sangat memprihatinkan? Para penegak hukum sudah banyak yang terang-terangan melakukan pemalakan kepada masyarakat, baik yang sedang terlibat masalah hukum, maupun yang hanya sekadar ingin melihat pertunjukan hiburan di Indonesia, juga dipalak sehingga menjadi viral di dunia internasional.

Harusnya bagaimana?

Harusnya kabinet Prabowo-Gibran mempelajari dulu berbagai kondisi yang ada. Masalah-masalah yang krusial, segera dicari solusinya. Swasembada pangan sangat urgen, setuju segera diatasi. Masalah hukum masih carut-marut, segera diatasi. Masalah administrasi masih sengerkarut, segera diatasi. Dan seterusnya. Jadi, jangan seperti menarik selimut. Ingin melindungi perut, selimut ditarik, kaki dan tangan jadi kedinginan. □-d

**Dr Wing Wahyu Winarno, Dosen STIE YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta dan anggota Tim Pendamping Smart City Kemkominfo.*

Pojok KR

Penyediaan BBM ke masyarakat, Pertamina diminta beri kepastian.

-- Tentunya bukan pasti bohong.

Kasus pagar laut, Kades Kohod didenda Rp 48 miliar.

-- Kabarnya siap membayar, uang dari mana?

Hasto Wardoyo apresiasi masjid ikut peduli kelola sampah.

-- Urusi dulu pengelolaan sampah di kampung.



Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPPA.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriana Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampiono MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sampianto, MM, CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) .Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) • Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .

Wartawan : H Ishaq Zubaida Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.